



## Berubah

Presiden Direktur BII Ridha Wirakusumah didampingi Komisaris Independen Budhi Dyah Sitawati dan Presiden Komisaris Datuk Megat Zaharuddin bercengkerama setelah rapat umum pemegang saham luar biasa di Jakarta kemarin. Rapat menyetujui perubahan susunan dewan komisaris dan direksi.

# Ditjen Pajak Keberatan Zakat Kurangi Pajak

Zakat sudah diakomodasi sebagai pengurang penghasilan bruto.

**JAKARTA** — Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo mengatakan kurang sepakat dengan gagasan zakat dapat mengurangi kewajiban membayar pajak, seperti tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. "Secara pribadi saya kurang sependapat," kata Tjiptardjo dalam buka bersama di gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta kemarin.

Menurut Tjiptardjo, paling tidak ada dua alasan pembayaran zakat tidak dapat mengurangi kewajiban membayar pajak. Pertama, Undang-Undang Perpajakan sudah mengakomodasi kewajiban membayar zakat bagi kalangan Islam. Zakat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan bersih yang dikurangi faktor pengurang, termasuk zakat. "Zakat diakomodasi sebagai bunga dalam undang-undang sebagai pengurang penghasilan bruto," katanya.

Sedangkan alasan kedua, zakat dianggap sebagai kewajiban religius setiap orang Islam dan bukan kewajiban bernegara. Implikasinya, zakat dan pajak merupakan dua entitas yang berbeda sehingga harus ditarik secara terpisah. "Zakat itu urusan manusia dengan Tuhan," katanya.

Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat sudah masuk program legislasi nasional 2010. Rancangan ini diajukan Kementerian Agama dan organisasi kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah dan NU, karena pengelolaan zakat lewat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dianggap kurang memadai.

Menurut pengusul rancangan undang-undang ini, potensi zakat umat Islam di Indonesia mencapai Rp 70 triliun. Jika gagasan zakat bisa mengurangi pajak, potensi penerimaan negara dari pajak akan berkurang minimal Rp 70 triliun. Gagasan ini diharapkan meningkatkan jumlah pembayar zakat di Indonesia.

Tjiptardjo mengatakan, sejauh ini Di-

rektorat Jenderal Pajak sudah menerima beberapa masukan dari beberapa kalangan berkaitan dengan latar belakang usul zakat mengurangi pajak. Meski mengaku tidak sependapat, Tjiptardjo mengaku masalah zakat masih terbuka sebagai bahan perdebatan.

Mengenai potensi kehilangan pendapatan dari pajak jika gagasan zakat mengurangi pajak terwujud, Tjiptardjo mengatakan pihaknya belum membuat kajian. "Jadi potensi kehilangan penerimaan belum kami ketahui," katanya. Jika gagasan ini jadi dilaksanakan, beban Ditjen Pajak semakin berat karena target penerimaan pajak terus dinaikkan setiap tahun.

Tahun depan, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan pajak hingga Rp 839,5 triliun atau meningkat 12,9 persen dibanding target dalam anggaran penerimaan negara perubahan tahun ini. Pemerintah akan memberi perhatian yang tinggi pada pengendalian potensi melalui intensifikasi ataupun ekstensifikasi. ● ANTON WILLIAM

# Swiss Serahkan Ribuan Data Pengemplang Pajak ke Amerika

**JENEWA** — Pemerintah Swiss menyatakan telah menyerahkan sekitar 2.000 nama orang kaya Amerika Serikat yang diminta Washington dalam kaitan dengan penyelesaian kasus pengemplangan pajak, yang melibatkan bank terbesar Swiss, UBS AG.

Dalam sebuah pernyataan dua hari lalu, jumlah akun yang diserahkan masih separuh dari total permintaan (4.450) dan dikirimkan kepada Internal Revenue Service (IRS). Sisa data akan dikirimkan ke Washington hari ini. IRS merupakan lembaga federal Amerika Serikat yang bertugas mengumpulkan pajak dan menetapkan hukum pendapatan dalam negeri, dan berada di bawah Departemen Keuangan.

IRS mengaku gembira dengan kemajuan yang dibuat oleh pemerintah Swiss dan mengindikasikan sisa informasi yang akan dikirimkan tak akan menghalangi penyelesaian perjanjian. Otoritas Amerika akan menarik gugatan terhadap UBS, yang ditunda sejak didaftarkan pada Agustus tahun lalu.

"Kami membenarkan informasi itu dan hingga kini IRS telah menerima informasi terhadap 2.000 akun," ujar IRS dalam pernyataan resminya. "Dari informasi yang kami dapatkan hingga hari ini dan kepastian dari pemerintah Swiss, kami mengantisipasi penarikan gugatan (John Doe Summons) pada musim semi ini."

Kasus dugaan pengemplangan pajak ini berawal tiga tahun lalu, UBS dituduh membantu ribuan klien asal Amerika Serikat tak membayar jutaan dolar yang disimpan di rekening yang berada di luar negeri.

Tahun lalu UBS setuju menyerahkan lebih dari ratusan akun kliennya dan membayar penalti US\$ 780 juta atas persetujuan penangguhan hukuman. Namun Washington meminta UBS mengungkapkan 4.450 klien Amerika-nya atau akan menghadapi penuntutan yang memakan biaya besar.

Pemenuhan perjanjian sempat tertunda oleh keputusan pengadilan Swiss dan kemarahan parlemen karena perjanjian itu dianggap merendahkan kebijakan rahasia perbankan Swiss yang terkenal ketat.

Pemerintah berhasil mendapatkan persetujuan parlemen setelah memperingatkan risiko kehancuran UBS dan perekonomian Swiss jika permintaan Washington itu disepelekan. ● AP | RIEKA RAHADIANA

"Harta yang kita miliki lebih bernilai jika dirasakan oleh orang yang tidak mempunyainya"

"Allah mengajarkan kita untuk selalu membagikan rezeki yang kita peroleh kepada kaum miskin, sebab di dalam harta itu ada hak untuk mereka."

PROVINSI DKI JAKARTA  
**BAZIS**  
Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah

Gd. Prasada Sasana Karya  
Jl. Suryopranoto No. 8 Petojo Utara Gambir, Jakarta Pusat.  
Telp. (021) 3901367, 63866719 Fax. (021) 638 66 761  
www.bazisdki.go.id  
E-mail: bazisdki@bazisdki.go.id



Hotline : 021-3901367

Salurkan ZIS Anda Ke BAZIS DKI JAKARTA

Nomor Rekening Basis :



035.301234.4



44566-06



701.700.3002